

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

I Ketut Aditya Teken¹ Arina Romarina, SE, M.Ec.Dev²

NPP. 31.0722

Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali

Program Studi Keuangan Publik

Email: adityat117@yahoo.com

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): The Local Government Information System (SIPD) is an innovative system developed by the Central Government to support the implementation of local government in regional financial management. However, in its application there are often technical glitches and obstacles. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how effective the application is, analyze the inhibiting factors and efforts made, as well as the efforts made so that the implementation of the system becomes effective. **Method:** This study used a descriptive approach with qualitative methods, and data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The author takes several steps to analyze the data that has been collected, namely data reduction, data presentation, and data verification. **Result:** Based on observations and interviews, it shows that the implementation of the Local Government Information System (SIPD) has not been effective due to lack of socialization, training, and training, lack of expertise of assistance personnel and human resources in using the system, slow response from the Central Government to problems reported by agencies, and a financial management system that has not been fully implemented. Efforts are made by maintaining coordination and collaboration with the central government, attending training and technical guidance, and using a companion system in making financial statements. **Conclusion:** Thus, this system has not been effective in its application and it is necessary to return to routine training, mentoring and application refinement for its implementation to be effective.

Keywords: Regional Government Information System, Performance, Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem inovatif yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam penerapannya sering terjadi gangguan dan kendala teknis. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapannya,

menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan, serta upaya yang dilakukan agar penerapan sistem menjadi efektif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis melakukan beberapa langkah untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum efektif karena kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan diklat, kurangnya keahlian tenaga pendamping dan sumber daya manusia dalam penggunaan sistem, lambatnya tanggapan dari Pemerintah Pusat terhadap masalah yang dilaporkan oleh dinas, serta sistem pengelolaan keuangan yang belum berjalan seluruhnya. Upaya yang dilakukan dengan tetap menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, serta menggunakan sistem pendamping dalam pembuatan laporan keuangan. **Kesimpulan:** Dengan demikian, sistem ini belum efektif dalam penerapannya dan diperlukannya pelatihan rutin pendampingan dan penyempurnaan aplikasi kembali agar pelaksanaannya efektif.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kinerja, Efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja keuangan menjadi suatu aspek berurgensi untuk dikaji lebih lanjut karena sering menjadi suatu permasalahan penting. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tuntutan dalam mengelola suatu kinerja keuangan daerahnya menjadi baik, hal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya penganggaran berbasis kinerja. Organisasi sektor publik, departemen dan lembaga negara memegang suatu tanggungjawab dalam upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas publik. Anggaran yang direncanakan dengan baik pada suatu organisasi perangkat daerah menjadi salah satu syarat kinerja keuangan dapat dikategorikan baik, tercapainya tujuan operasional yang ditetapkan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kinerja keuangan juga ditunjang dengan indikator yakni transparansi, akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang jelas.

Guna menghadapi perkembangan teknologi pengetahuan yang begitu pesat maka diterapkan sistem informasi manajemen yang berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Munculnya inovasi mempermudah pemenuhan kebutuhan individu sehingga menjadi awal perkembangan teknologi pengetahuan tersebut terjadi. Memperoleh informasi terbaru menjadi hal yang diperlukan seorang pemimpin untuk mengetahui isu-isu terbaru sehingga jaringan internet merupakan jawaban dari teknologi yang andal saat ini. Sistem informasi manajemen adalah sebuah alat yang digunakan mengolah data dari berbagai sumber menjadi sebuah data konkret. Sistem informasi manajemen merupakan media untuk menyebarkan data dengan mencapai semua bagian dengan syarat penerima data bisa mengakses data yang diterima tersebut (Noerlina, 2011:118). Jajaran pemerintahan Kota Denpasar mendapatkan penghargaan WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. BPK sebagai lembaga yang mengawasi dan melaksanakan investigasi terhadap pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 (BPS, 2023). Pencapaian ini merupakan dampak positif terhadap penerapan aturan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar. Penilaian BPK (LKPD) Kota Denpasar tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut adalah

laporan hasil penilaian BPK (LKPD) Kota Denpasar tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun terlampir pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2018-2022 Kota Denpasar



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018-2022 BPK Provinsi Bali

Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, bahwa Pemerintah Kota Denpasar mampu mempertahankan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal itu terlihat dari pernyataan BPK kepada LKPD Kota Denpasar yang mendapat pernyataan tanpa syarat. Atas prestasi tersebut, Kota Denpasar mendapat penghargaan advokasi karena mendapatkan laporan hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian secara berurutan.

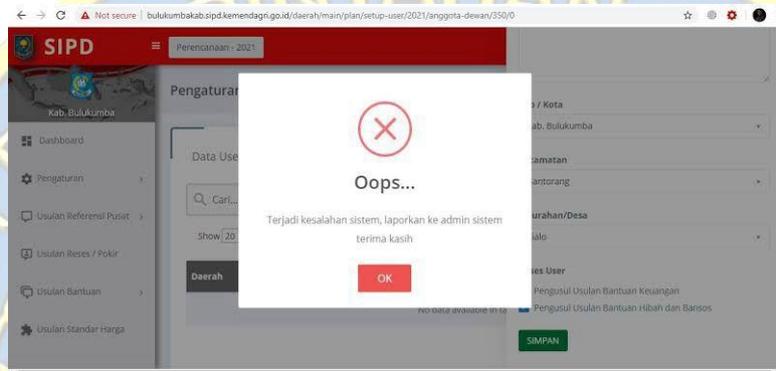
1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.130/736/SJ tentang percepatan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketiga peraturan tersebut yang dikeluarkan pemerintah pusat mewajibkan seluruh dinas di Indonesia untuk wajib menggunakan sistem ini sebagai pengelolaan keuangan daerahnya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan dokumentasi dan administrasi, serta pengolahan informasi pengembangan daerah sebagai bentuk data untuk masyarakat dan digunakan sebagai media menentukan hasil yang diputuskan dengan tujuan peningkatan perencanaan dan pelaksanaan, serta yang dievaluasi dari kinerja pemerintah (Bappeda kaltimprov,2022).

Kuangan daerah Kota Denpasar dalam pengelolaannya memperoleh banyak manfaat melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu kemudahan menginput data, perhitungan yang tepat, cepatnya proses pengolahan data, waktu dan biaya yang efisien, anggaran semakin transparan, dan percepatan penyusunan laporan keuangan yang berguna bagi pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Transparansi penyusunan dan pelaporan oleh sistem menjadi harapan baru agar tidak ada penyelewengan dalam penerapan kinerja penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bidang perbendaharaan BPKAD Kota Denpasar, menyatakan bahwa penggunaan SIPD di BPKAD Kota Denpasar masih kurang maksimal. Pengelolaan sistem yang tergolong baru ini, belum mampu dilakukan oleh semua pegawai di Pemerintah Kota Denpasar. Kemudian server yang terkendala error ketika diakses menyebabkan sulitnya dalam sistem dan aplikasi tersebut. Berikut merupakan sistem pemerintahan daerah yang terkendala error. Adapun terlampir pada gambar berikut:

Gambar 2. Sistem Pemerintahan Daerah yang Terkendala Error



Sumber: helpdesk.sipd

Kesenjangan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya maksimalnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian SIPD dengan baik.
2. Sering terjadinya kendala teknis, sistem error, jaringan dan sistem aplikasi down dalam penggunaan aplikasi SIPD.
3. Lambatnya respon admin pemerintah pusat dalam penanggapi permasalahan yang dilaporkan BPKAD Kota Denpasar.
4. SIPD yang belum bisa digunakan sebagai one system dalam pelaporan keuangan daerah dan diperlukan aplikasi pendamping untuk menunjang kinerja pelaporan keuangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan menganalisis data hasil penelitian, penulis merujuk hasil penelitian terdahulu, diantaranya **pertama**, penelitian dari Dimas Aldy Wibowo dkk. (2023) di mana memiliki fokus penelitian pada proses penatausahaan sistem. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan SIPD dalam kegiatan penatausahaan sistem keuangan daerah masih belum maksimal karena belum mampu meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas. Penelitian **kedua**, Chinda Aqhni Adisi (2022) memiliki fokus penelitian yaitu pegawai yang mengimplementasikan program telah sejalan terhadap prosedur yang ditetapkan, sehingga dinas berhasil mencapai target dan tujuan yang diinginkan dari sistem tersebut, serta mencatat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penggunaan sistem, hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa program SIPD pada BPKAD bisa dikatakan lumayan optimal. Adapun hambatan atau kendala yang terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Denpasar, seperti masalah jaringan yang menyebabkan kesalahan, kesulitan dalam pembuatan template,

sehingga penerapan SIPD di BPKAD masih mengandalkan aplikasi tambahan. Penilaian atas pemahaman program, pencapaian sasaran yang tepat, kepatuhan waktu, pencapaian tujuan, dan dampak nyata masih menjadi tolok ukur dalam menilai aplikasi pendamping ini.

Selanjutnya pada penelitian **ketiga**, Nidya Vitriana dkk. (2022) melakukan penelitian yang berfokus pada analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan didapatkan hasil yaitu penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam mendukung pengelolaan informasi dan sistem keuangan daerah belum maksimal. Penelitian **keempat**, Putri Pandan Wangi (2021) melakukan penelitian yang berfokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang sedang digunakan belum optimal, sehingga dalam pelaporan, perlu didukung oleh sistem tambahan atau sistem ganda. Hal ini menyebabkan SIPD digunakan sebagai cadangan untuk mencadangkan data atau back up data. Pada penelitian **kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra (2021) meninjau tentang evaluasi efektif atau tidaknya penerapan aplikasi atau sistem, mengidentifikasi hal yang menjadi penghambat, dan mengevaluasi usaha-usaha yang memiliki tujuannya meningkatkan kualitas dokumen RKPD. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIPD dalam pembuatan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk dirasa belum optimal. Kualitas dari dokumen RKPD yang dihasilkan cenderung tidak konsisten dengan dokumen RPJMD yang sudah ada. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap proses pembuatan dokumen, peningkatan pelatihan bagi pengguna aplikasi, serta optimalisasi fitur-fitur aplikasi untuk memastikan keselarasan antara RKPD dan RPJMD.

Kemudian pada penelitian **keenam**, Arda Sandorio Nalle (2022) melakukan penelitian mengenai sistem dalam penyusunan dengan hasil penelitian yaitu efektivitas SIPD dalam menyusun APBD di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao masih belum optimal atau dapat dikatakan belum efektif dan efisien. Penelitian **ketujuh**, Raine Soni Pratama Domeng (2023) meneliti tentang analisis penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penelitian tersebut menerangkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini masih kurang optimal karena kurangnya SDM yang berkompeten, jaringan internet yang terkendala, dan penatausahaan yang baru mencapai tahap penganggaran. Akibatnya, pemerintah masih mengandalkan sistem terdahulu, yaitu SIMDA, untuk pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Berikutnya pada penelitian **kedelapan**, Risma Siswi Pradipta (2022) melakukan penelitian mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Kota Madiun berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian lain yang sifatnya masih umum. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas penyusunan RKA melalui SIPD di Kota Madiun telah memberikan hasil yang baik lewat penerapannya sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan telah berjalan secara optimal.

Pada penelitian berikutnya yaitu penelitian **kesembilan**, Nasrun Naida dkk. (2023) melakukan penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan dari SIPD terhadap laporan dari sistem keuangan daerah dan korelasinya dengan sumber daya aparatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini menemukan bukti empiris tentang banyak hal yang kaitannya dengan laporan mutu keuangan pemerintahan daerah. SIPD juga

memberikan dampak positif kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber Power man dapat memperkuat hubungan pengaruh antar sistem informasi pemerintahan daerah ke laporan mutu keuangan daerah pemerintahan. Penelitian terakhir yaitu penelitian **kesepuluh**, Mahmoud Khaled dkk. (2019) berfokus meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi suatu keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen keuangan pemerintahan di sektor-sektor publik Yordania dan didapatkan hasil bahwa kualitas informasi, sistem kualitas, kualitas layanan, resistensi pengguna, pelatihan, dan keterlibatan pengguna merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berpotensi meningkatkan manfaat bersih GFMIS di sektor publik Yordania, dan akibatnya menjamin keberhasilan penerapan GFMIS.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yaitu di BPKAD Kota Denpasar Provinsi Bali. Selain itu, novelty dengan penelitian lain yaitu fokus penelitian pada kinerja keuangan dinas terkait dalam penerapan SIPD. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep teori efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Streers (1985:53).

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dampak yang positif dan bermakna dalam menganalisis bagaimana efektivitas penerapan sistem, mengidentifikasi dan memahami faktor penghambat, serta usaha apa saja yang dapat diterapkan agar dapat mengatasi hambatan tersebut sehingga penerapan sistem menjadi lebih efektif.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini diterapkan agar menghasilkan gambaran yang akurat, sesuai dengan kenyataan, dan sistematis tentang fakta atau sifat serta hubungan antar elemen yang diselidiki. Dalam bukunya tentang metode penelitian, Nazir (2014) mengartikan metode deskriptif sebagai pendekatan untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik dalam suatu kelompok manusia, serangkaian kondisi, objek, kelas peristiwa, atau sistem pemikiran pada saat ini. Dari hal di tersebut, penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya yaitu menjelaskan data gambaran sistematis, dengan fakta akurat yang berhubungan dengan indikasi yang ada, yang dalam hal ini mengenai efektivitas penerapan SIPD sebagai penunjang kinerja keuangan di BPKAD Kota Denpasar. Sedangkan pendekatan induktif adalah suatu skema untuk memecahkan suatu problem atau masalah dengan lebih cepat melalui proses memperoleh data. Pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk pengembangan konsep dan teori. Sehingga Sistem penelitian ini mengharuskan pustaka digunakan sesuai asumsi metodologis.

Pengumpulan data adalah hal penting di mana ini menjadi strategi dalam memperoleh data untuk penelitian. Penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan penerapan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan dapat bersifat terbuka atau tersembunyi, karena peneliti akan mengamati situasi dan kondisi di lapangan

selama pelaksanaan penelitian nanti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur mengingat permasalahan yang akan diteliti penulis harus lebih terbuka dalam pengamatan dan pengkajian yang berkaitan dengan efektivitas pengaplikasian SIPD sebagai penunjang kinerja keuangan di BPKAD Kota Denpasar. Adapun untuk teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dilakukan dengan cara menghimpun informasi dalam bentuk foto, buku, peraturan, dan materi lainnya yang akan dianalisis untuk keperluan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan triangulasi. Patton (dalam Sugiyono, 2017:242) mengemukakan bahwa dengan menggunakan triangulasi, kekuatan data akan lebih besar karena memanfaatkan lebih dari satu pendekatan untuk mengumpulkan data. Triangulasi dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber diterapkan melalui pengumpulan informasi serta data dari berbagai sumber yang berbeda-beda, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda namun saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian ini menerapkan suatu sistem yang dapat menganalisis data dengan penerapan teknik sesuai model Miles dan Huberman yang dijelaskan oleh Sugiyono melibatkan empat tahapan utama. Langkah pertama adalah Pengumpulan Data, yang mencakup pengambilan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, data akan dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian yang ada. Kedua, adalah Reduksi Data, yang mencakup perangkuman, pemilihan hal pokok, pemfokusan hal penting, dan pencarian pola dan tema agar informasi yang diperoleh lebih jelas. Ketiga, adalah Penyajian Data, di mana informasi yang telah direduksi disajikan, terutama melalui narasi yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Terakhir, adalah Verifikasi Data, di mana dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dengan dukungan bukti yang valid. Kesimpulan yang dituliskan harus kredibel dan mungkin berubah seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan.

Penelitian ini melibatkan informan, yakni individu yang mampu memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Aplikasi SIPD di BPPKAD Kabupaten Denpasar. Enam orang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Informan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1
2	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	1
3	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi Dan Pelaporan	1
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	1
5	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	1
6	Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	1
Jumlah		6

Sumber: BPKAD Kota Denpasar

III. HASIL/PEMBAHASAN

Menurut Teori Duncan dalam Richard M. Streers (1985:53) terdapat tiga kriteria efektivitas perencanaan, diantaranya:

1. Pencapaian Tujuan;
2. Integrasi;
3. Adaptasi.

3.1 Dimensi Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan akan terlihat berdasarkan sejauh apa tahapan suatu kegiatan kerja atau program pencapaian sasaran yang ditentukan dari kegiatan ataupun program tersebut, begitu juga dengan pencapaian tujuan dalam pengaplikasian SIPD.

3.1.1 Kurun Waktu Pencapaian

BPKAD Kota Denpasar saat ini telah mengadopsi aplikasi SIPD dalam sistem kelola keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai meningkatkan tata kelola keuangan BPKAD yang lebih terbuka, bertanggungjawab, serta melibatkan partisipasi. Selain itu kurun waktu untuk mencapai pencapaian dalam menggunakan SIPD sebagai one system untuk mengelola keuangan juga belum bisa diterapkan sehingga menggunakan aplikasi lain secara berdampingan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang maksimal.

3.1.2 Target dan Realisasi Anggaran

Penulis menyimpulkan bahwa target dan realisasi anggaran sudah terealisasi dengan baik namun dalam pembuatan laporannya belum bisa menggunakan one system, dan harus menggunakan aplikasi pendamping berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan SIPD yang belum dapat diaplikasikan dalam tahap pelaporan keuangan, BPKAD Kota Denpasar masih memerlukan aplikasi lain yaitu SIPKD untuk melakukan tahapan pelaporan keuangan yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang terbuka, bertanggungjawab, dan berketerlibatan.

3.1.3 Dasar Hukum

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam Surat Edaran Mendagri No. 130/736/SJ mengenai Percepatan Implementasi SIPD serta Peraturan Mendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, terkait akan pemenuhan tujuan serta beberapa indikator, seperti periode waktu pencapaian, target serta realisasi anggaran, hingga dasar hukum, implementasi SIPD guna mengembangkan kinerja keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar masih kurang dapat dianggap efektif. Hal ini dikarenakan indikator terkait target dan realisasi anggaran sampai saat ini belum tercapai, yang disebabkan oleh fakta bahwa aplikasi SIPD baru mencapai tahap penatausahaan dan belum mencapai tahap pelaporan.

3.1.4 Strategi Pencapaian Tujuan

Ternyata prosedur pengaplikasian SIPD di BPKAD Kota Denpasar kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh indikator strategi pencapaian tujuan yang belum dapat terwujud dengan optimal dan sasaran yang kurang tepat. Sosialisasi yang diberikan terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tergolong minim dan belum efektif sehingga ini menyebabkan kurangnya informasi dan pelatihan secara langsung yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, terlebih khusus pegawai di BPKAD Kota Denpasar.

3.2 Dimensi Integritas

Integrasi merupakan salah satu dimensi dalam mengukur suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan efektif, pengukuran ini dilakukan dengan melihat kemampuan dari suatu organisasi dalam melaksanakan sosialisasi atau komunikasi dengan berbagai bentuk organisasi yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan secara efektif.

3.2.1 Prosedur

Proses penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Denpasar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini sependapat dengan penelitian terdahulu oleh Chinda Aqhni Adisi (2022) bahwa diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap pegawai yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah karena masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan aplikasi ini. Belum optimalnya sistem ini dibuktikan juga pada saat memasukkan data keseimbangan debit kredit tetapi muncul dalam sistem belum balance.

3.2.2 Analisis Perencanaan

Analisis perencanaan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Denpasar belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya aplikasi pendamping dalam penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan (aklap), walaupun untuk tahap perencanaan sudah secara keseluruhan menggunakan SIPD. Hal ini didukung dengan penelitian Putri Pandan Wangi (2021) yang menyatakan bahwa dibagian penatausahaan, masih ada keterbatasan yang menghambat pencapaian keoptimalan karena adanya kendala dalam sistem tersebut, sehingga tidak mampu menghasilkan laporan keuangan dengan baik.

3.3 Dimensi Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai kapasitas suatu organisasi dalam caranya agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi yang digunakan untuk bekerja di segala situasi yang berbeda. Adaptasi perilaku pegawai dalam menyesuaikan dengan sistem baru yang sebelumnya menggunakan aplikasi berbasis software SIPKD dalam pengelolaan keuangan dan berubah menggunakan aplikasi yang berbasis web yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini.

3.3.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur di kantor BPKAD Kota Denpasar telah memberikan dukungan yang memadai bagi para pegawai dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Semua kantor dilengkapi 10 unit komputer serta jaringan internet yang mendukung pengelolaan keuangan. Namun, terkendala ketika dari SIPD pada server pusat terganggu, yang mengakibatkan tidak dapatnya akses ke SIPD.

3.3.2 Monitoring Kesesuaian Program

Monitoring kesesuaian program di kantor BPKAD Kota Denpasar dilakukan melalui undangan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berekonsiliasi angka yang diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan SIPKD. Dengan kata lain, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini kurang mampu digunakan dalam keadaan utuh, karena angka patok dalam pencairan dana terdapat dalam SIPKD yang sudah terintegrasi dengan bank. Pertanggungjawaban yang bagus didapatkan melalui proses penatausahaan yang bagus, itu pula yang menjadi alasan penerapan dua aplikasi ini. Dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih belum bisa digunakan secara optimal sebagai single system penatausahaan keuangan daerah sehingga masih perlu peningkatan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas Penerapan SIPD Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan BPKAD Kota Denpasar belum berjalan optimal dan efektif karena pada beberapa indikator masih ditemukan kendala dan hambatan yang ada. Peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan menemukan temuan diantaranya pemahaman pegawai yang masih kurang dalam hal penggunaan teknologi dan pengetahuan tentang aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga mengalami kesulitan beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Raine Soni Pratama Domeng (2023) yang menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga ahli di bidang teknologi yang mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menyebabkan pengoperasiannya tidak mencapai tingkat optimal. Selain itu, lambatnya komunikasi pihak pemda melalui BPKAD kepada admin di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Chinda Aqhni Adisi (2022) yang menyebutkan bahwa saat ingin mendiskusikan kendala Sistem Informasi Pemerintahan Daerah cukup sulit mendapatkan respon dari pusat mengingat program ini dilakukan seluruh Indonesia sehingga mendapatkan solusi atau arahan dari pusat menjadi sulit. Dimana respon terkait permasalahan yang dihadapi tidak dapat dengan segera. Kemudian dari penatausahaan yang masih belum optimal sehingga masih banyak kekeliruan dari sistem.

Kekurangan yang peneliti temukan diantaranya pembuatan laporannya belum bisa menggunakan one system dan harus menggunakan aplikasi pendamping berupa SIPD, sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan video tutorial di Youtube dan pelatihan serta diklat yang dilaksanakan belum membuat pegawai mahir dan aplikasi masih sering bermasalah, aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah belum dapat digunakan sepenuhnya serta terkadang sistemnya sering mengalami kendala/error, masih

diperlukannya aplikasi pendamping dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan (aklap), dan SIPD masih belum bisa digunakan secara optimal sebagai single system penatausahaan keuangan daerah sehingga diperlukan peningkatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan SIPD Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Daerah BPKAD Kota Denpasar belum efektif karena pada indikator target dan realisasi anggaran pembuatan laporannya belum bisa menggunakan one system dan harus menggunakan aplikasi pendamping berupa SIPD. Kemudian pada indikator indikator strategi pencapaian tujuan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan video tutorial di Youtube dan pelatihan serta diklat yang dilaksanakan belum membuat pegawai mahir dan aplikasi masih sering bermasalah. Ditemukan juga masalah pada indikator lain seperti aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah belum dapat digunakan sepenuhnya serta terkadang sistemnya sering mengalami kendala/error, masih diperlukannya aplikasi pendamping dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan (aklap), dan SIPD masih belum bisa digunakan secara optimal sebagai single system penatausahaan keuangan daerah sehingga diperlukan peningkatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan saat penelitian ini dilakukan yaitu kurangnya sosialisasi, berupa pelatihan dan diklat yang dilakukan secara berkala, belum cukupnya tenaga pendukung dan SDM dari para pegawai, kurangnya tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap kendala yang dialami pengguna, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang belum bisa digunakan secara seutuhnya dan diperlukannya aplikasi pendamping

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan bimbingan teknis secara berkala kepada Pemerintah Daerah, melaksanakan sosialisasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumbernya tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dan mempertimbangkan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai alternatif untuk mengatasi masalah yang timbul akibat keterbatasan penggunaan SIPD.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghali.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>

Badan Pusat Statistik, Kota Denpasar Dalam Angka, (2023)

Domeng, R. S. P. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Bpkad Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. *Journal IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/15226/>

Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(2), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>

Naida, N., Amir, A. M., Din, M., A, M. I., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. *Journal of World Science*, 2(8), 1123–1129. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.390>

Nalle, A. S. (2022). Efektivitas Aplikasi SIPD dalam Penyusunan APBD pada Badan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal IPDN*.

Noerlina. (2011). Evaluasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Pada Bidang Usaha Jasa. Binus University.

Pradipta, R. S. (2022). Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Journal IPDN*.

SIPPD Bappeda Kalimantan Timur. 2022

Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), Juli 2022. P-ISSN XXXX, E-ISSN 2963-8585. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>

Wangi, P. P. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Journal IPDN*, 1–9.

Wibowo, Dimas Aldy, Elin Erlina Sasanti, N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.528>